



BRIEFING SUBSIDI ENERGI INDONESIA

Sebuah kajian dwi-bulanan tentang kebijakan subsidi energi Indonesia dan pasar energi

November 2015

Sebagai bagian dari kerjanya di bidang kebijakan energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, the Global Subsidies Initiative (GSI) dari International Institute for Sustainable Development (IISD) menerbitkan briefing rutin tentang isu terkait subsidi energi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Lucky Lontoh di lucky.lontoh@iisd.org

Sorotan

- Pada APBN 2016, dana sebesar Rp63,7 triliun (US\$4,5 miliar) dialokasikan untuk berbagai bahan bakar, termasuk diesel, LPG, minyak tanah, dan gas cair untuk kendaraan (LGV). Dalam APBN tersebut juga dialokasikan sebesar Rp38,4 triliun (USD\$2,7 miliar) untuk subsidi listrik.
- Pada 7 Oktober, pemerintah mengumumkan sejumlah penurunan harga bahan bakar. Penurunan tersebut mencakup penurunan harga Solar –merk diesel dari Rp6.900 per liter menjadi Rp6.700 per liter, serta penurunan harga berbagai bahan bakar non-subsidi seperti Avtur (bahan bakar pesawat), Pertamina (bensin RON 92), Pertalite (bensin RON 90), dan LPG 12kg non-subsidi.
- Alokasi subsidi listrik 2016 menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan 2015, yang mencerminkan niat pemerintah untuk menerapkan reformasi subsidi listrik pada 2016.
- Kuota diesel bersubsidi ditetapkan sebesar 16 juta kiloliter dan dianggarkan sebesar Rp16 triliun (US\$1,12 miliar). Kuota untuk LPG bersubsidi ditetapkan sebesar 6,6 juta ton, atau setara dengan Rp31 triliun (US\$2,17 miliar). Alokasi subsidi LGV tidak sampai kuota maksimal, namun diberikan plafon moneter sebesar Rp6,4 miliar (US\$0,44 juta). Volume minyak tanah bersubsidi ditetapkan sebesar maksimal 688 ribu kiloliter, atau setara dengan Rp2,6 triliun (US\$0,182 miliar).

APBN dan Subsidi Bahan Bakar Indonesia 2016

Pada 30 Oktober, DPR telah mengesahkan APBN 2016. APBN ini mengantisipasi adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dari 5,7% pada 2016 menjadi 5,3% pada 2016. Inflasi tahunan diperkirakan sebesar total 4,7% pada 2016, yang berarti 0,3 persen lebih rendah dibandingkan 2015. APBN tersebut juga memperkirakan terus berlangsungnya depresiasi rupiah terhadap US dollar, dan APBN tersebut juga didasarkan pada harga minyak mentah sebesar US\$50 per barel. Angka ini sedikit lebih rendah dari sebelumnya, yaitu US\$60 per barel yang terdapat pada APBN Perubahan 2015, dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan APBN 2014, di mana harga minyak mentah diperkirakan sebesar US\$110 per barel.

Suntikan Modal kepada BUMN

Sejak awal Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014, suntikan modal besar kepada BUMN telah menjadi alat kebijakan utama pemerintah untuk meredistribusikan penghematan fiskal yang didapat dari reformasi subsidi bahan bakar fosil pada akhir 2014 dan awal 2015. Pada 2015, pemerintah menyalurkan APBN sebesar Rp64,88 triliun (US\$5,5 miliar) untuk memperkuat 40 BUMN (GSI, 2015). Pada Proposal APBN 2016 awal pemerintahan, pemerintahan Jokowi sekali lagi menunjukkan niatnya untuk memperkuat BUMN melalui transfer APBN, namun DPR menentang rencana tersebut sehingga rencana itu belum dimasukkan ke dalam APBN yang disetujui pada 30 Oktober. Isu ini akan didiskusikan pada pertemuan Komisi VI tentang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha, dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2016 (Detik Finance, 2015).

Table 1 APBN – Indikator Makroekonomi

Indikator	2014 LKPP	2015 APBN	2015 APBN-P	2016 APBN
Pertumbuhan	5.06%	5.8%	5.7%	5.3%
Inflasi (yoy)	8.36%	4.4%	5.0%	4.7%
Nilai Tukar (IDR/ US\$)	11,878	11,900	12,500	13,900
Nilai Suku Bunga (3 months)	5.80%	6.0%	6.2%	5.5%
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel)	97	105	60	50
Produksi Minyak (ribu barel/hari)	794	900	825	830
Produksi Gas Alam (juta barel setara minyak/ hari)	1,224	1,248	1,221	1,155

Sumber: Laporan Audit APBN 2014, Nota Fiskal dan Proposal APBN 2016, (Sekretariat Kabinet, 2015), (Antara, 2015).

Table 2 Volume Bahan Bakar dan LPG Bersubsidi pada APBN

Jenis Bahan Bakar	2014 APBN-P	2015 APBN	2015 APBN-P	2016 APBN
Bensin (juta kiloliter)	29.4	29.6	0	0
Diesel (juta kiloliter)	15.7	16.2	17.05	16
Minyak tanah (juta kiloliter)	0.9	0.9	0.85	0.69
LPG (juta ton)	4.99	5.77	5.77	6.6

Sumber: (Kementerian Keuangan, 2015); (Badan Pemeriksa Keuangan, 2014); (TPID-DIY, 2014); (CNN Indonesia, 2015), (Detik.com, 2015).

Subsidi Bahan Bakar Fosil pada APBN 2016

Pada 2016, pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp63,7 triliun (US\$4,5 miliar) untuk berbagai bahan bakar, termasuk diesel, LPG, minyak tanah, dan gas untuk kendaraan (LGV). Pada awalnya pemerintah mengusulkan Rp70,96 triliun (US\$4,9 miliar) untuk subsidi bahan bakar, namun jumlah tersebut dikurangi setelah dibahas di DPR (Kementerian Keuangan, 2015). Kuota diesel bersubsidi ditetapkan sebesar 16 juta kiloliter dan dianggarkan sebesar Rp16 triliun (US\$1,12 miliar). Kuota untuk LPG bersubsidi ditetapkan sebesar 6,6 juta ton, setara dengan Rp31 triliun (US\$2,17 miliar). Alokasi untuk subsidi LGV tidak mencakup kuota maksimum, namun diberikan plafon anggaran sebesar Rp6,4 miliar (US\$0,44 juta). Kuota untuk minyak tanah bersubsidi ditetapkan sebesar 688 ribu kiloliter, senilai total Rp2,6 triliun (US\$0,182 miliar). APBN 2016 juga melakukan carry-over belanja subsidi bahan bakar yang setara dengan Rp12,7 triliun (US\$0,89 miliar) dari tahun fiskal 2015 (Detik.com, 2015).

APBN 2016 juga mengalokasikan Rp37,4 triliun (USD\$2,7 miliar) untuk subsidi listrik. Serupa dengan pembahasan di DPR terkait alokasi subsidi bahan bakar, proposal awal pemerintah untuk subsidi listrik sebesar Rp50 triliun sedikit diturunkan setelah terjadi negosiasi di DPR (Kementerian Keuangan, 2015).

Alokasi untuk subsidi listrik 2016 menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan 2015, ketika subsidi listrik diperkirakan berjumlah sebesar Rp73,1 triliun (US\$5,1 miliar) dan mencerminkan niat pemerintah untuk menerapkan reformasi subsidi listrik pada 2016. Detil lebih lanjut terkait rencana reformasi listrik dapat dilihat di bawah ini.

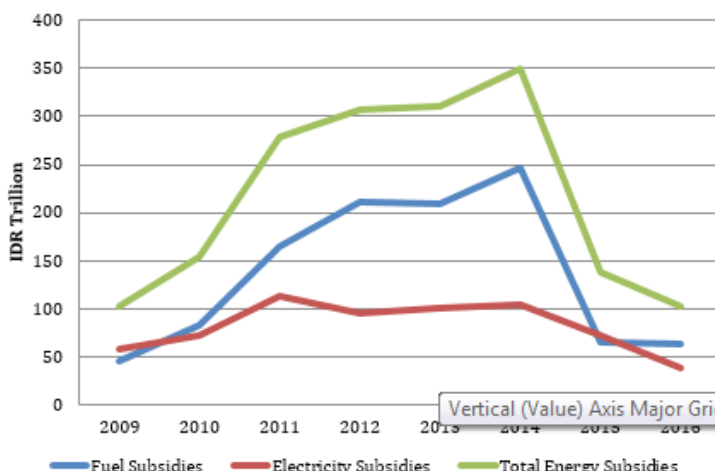
Reformasi Subsidi Listrik pada 2016

Dengan disahkannya APBN 2016, DPR telah memberi tanda persetujuan atas rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik. Reformasi subsidi listrik awalnya direncanakan untuk dilaksanakan pada Januari 2016 (Kompas, 2015), namun pada 4 November, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengumumkan bahwa reformasi tersebut akan ditunda hingga Juli 2016 karena alasan teknis.

Skema subsidi listrik Indonesia saat ini memberikan bantuan kepada dua kelompok rumah tangga dengan koneksi listrik terendah, yaitu 450VA atau 900VA. Total jumlah koneksi pada kedua kelas tersebut diperkirakan sebesar 45,36 juta, yang terdiri dari 22,9 juta koneksi 450VA dan 22,47 juta koneksi 900VA (Kompas, 2015). Meskipun modalitas perubahannya masih dibahas oleh pemerintah, Sudirman Said menyatakan bahwa jumlah penerima subsidi akan berkurang secara signifikan, dan bahwa subsidi ke depan hanya akan ditargetkan untuk

rumah tangga miskin dan rentan. Saat ini, menurutnya, 23 juta rumah tangga yang tidak termasuk kategori miskin atau rentan turut menikmati kebijakan subsidi. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa PT PLN nantinya akan bertanggung jawab menetapkan siapa saja penerima manfaat yang berhak menikmati subsidi dengan mengunjungi konsumen satu per satu untuk menguji apakah mereka layak menjadi penerima, serta untuk memastikan bahwa data konsumen tersebut benar-benar akurat. Salah satu indikator kelayakan tersebut menurutnya adalah apakah yang bersangkutan memiliki kartu perlindungan sosial seperti “Kartu Indonesia Sehat” dan “Kartu Keluarga Sejahtera”, atau “Kartu Indonesia Pintar (Riau Pos, 2015). Pelaksanaan reformasi ini juga diharapkan akan memanfaatkan “Basis data terpadu” untuk perlindungan sosial yang dikembangkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Basis data tersebut berisi informasi sosial ekonomi dari 96 juta warga, yang setara dengan sekitar 40 persen populasi total Indonesia, dan dapat membantu PT PLN dalam membuat subsidi listrik ke depan lebih tepat sasaran (Bah, Mardiananingsih, & Wijaya, 2014; TNP2K, n.d.; CNN Indonesia, 2015).

Gambar 1 Subsidi Energi Indonesia 2009-2016



Sumber: (Kementerian Keuangan, 2015), (CNN Indonesia, 2015), (Sekretariat Kabinet, 2015)

Perkembangan Terakhir Penetapan Harga Bahan Bakar Saat Ini

Pada 7 Oktober, Menteri Sudirman Said mengumumkan serangkaian penurunan harga bahan bakar. Penurunan ini mencakup penurunan harga Solar, dari Rp6.900 per liter menjadi Rp6.700 per liter, serta penurunan harga berbagai bahan bakar non-subsidi seperti Avtur (bahan bakar pesawat), Pertamina (bensin RON 92), Peralite (bensin RON 90), dan LPG 12kg non-subsidi. Harga bensin Premium dan LPG 3kg bersubsidi tidak berubah.

Sejak mereformasi subsidi bahan bakar secara resmi pada awal 2015, pemerintah telah memusyawarahkan isu terkait seberapa sering penyesuaian harga

konsumen harus dilakukan. Pada tiga bulan pertama setelah reformasi, harga bahan bakar cukup sering mengalami penyesuaian, namun tetap stabil dari 28 Maret hingga 1 Oktober.

Table 3 Perubahan Harga Bahan Bakar Terbaru

Jenis Bahan Bakar/Merk	Biaya Unit	Harga sebelum Oktober 2015	Harga setelah Oktober 2015
Premium (Bensin RON 88) – Jawa, Madura, dan Bali	Rp/liter	7,400	7,400
Premium (Bensin RON 88) – Di luar Jawa, Madura,	Rp/liter	7,300	7,300
Solar (Diesel otomotif)	Rp/liter	6,900	6,700
LPG 12kg	Rp/12kg	141,000	134,000
Pertamax (Bensin RON 92)	Rp/liter	9,250	9,000
Peralite (Bensin RON 90)	Rp/liter	8,400	8,300
Avtur (bahan bakar pesawat)	Tidak Ada	Tidak Ada	Down by 5.33%

Namun baru-baru ini Menteri Sudirman Said mengumumkan bahwa untuk ke depan, pemerintah akan menyesuaikan harga bahan bakar setiap tiga bulan sekali.

Meskipun subsidi bensin Premium telah direformasi secara resmi pada awal 2015, PT Pertamina baru-baru ini mengumumkan tentang kerugian yang dialami karena harga Premium tidak disesuaikan dengan formula penetapan harga (GSIa, 2015). Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian ESDM baru-baru ini mengeluarkan sebuah ikhtisar mendetil yang menunjukkan bahwa perbedaan harga per bulan antara harga konsumen dengan harga aktual yang telah dihitung sudah sesuai dengan mekanisme penetapan harga yang resmi. Ikhtisar tersebut, sebagaimana ditunjukkan di bawah ini, menunjukkan bahwa meskipun reformasi telah dilakukan pada awal

Gambar 2 Harga Bensin Premium (Non Jamali) – Harga jual versus harga aktual

Tanggal	Harga Bahan Bakar Menurut Formula Harga (Rp per liter)	Harga Bahan Bakar yang Ditetapkan Dengan Pertimbangan Politis	Perbedaan per liter	Total subsidi dalam miliar rupiah (berdasarkan volume penjualan)
1 Januari	7.600	7.600		
19 Januari	6.600	6.600		
1 Februari	6.300	6.600	300	
1 Maret	7.000	6.800	-200	-202,18
28 Maret	7.900	7.300	-600	-596,36
1 Mei	7.950	7.300	-650	-663,54
1 Juni	8.950	7.300	-1650	-1.640,79
1 Juli	9.100	7.300	-1800	-2.015,51
1 Agustus	8.450	7.300	-1150	-1.207,70
1 September	7.700	7.300	-400	-412,53
Total				-6738,61

Sumber: Ministry of Energy and Mineral Resources (2015).

2015, subsidi bahan bakar untuk bensin Premium secara de facto sebenarnya diterapkan kembali pada bulan Maret, dan sejak saat itu berfluktuasi sejalan dengan harga minyak internasional dan nilai tukar.

Undang-Undang Minyak dan Gas yang Baru

Para pengambil kebijakan saat ini sedang membahas perancangan undang-undang baru untuk mengatur sektor minyak dan gas Indonesia. Revisi Undang-Undang Migas yang lama tersebut dipicu antara lain oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 untuk membubarkan BPH Migas sebagai lembaga regulasi independen Indonesia sejak 2001. Meskipun modalitas UU Migas yang baru ini belum jelas, rancangan UU yang sudah ada menunjukkan bahwa pemerintah akan memperkuat kendali atas sektor migas, termasuk peran BUMN PT Pertamina (ReedSmith, 2015). Selain itu, diharapkan bahwa UU Migas yang baru tersebut akan merevisi atau menghapus total sistem Kontrak Bagi Hasil (KBH/PSC) yang saat ini masih diterapkan dan menetapkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban mengganti biaya eksplorasi dan produksi yang dikeluarkan investor asing (SKK Migas, 2015). KBH sebelumnya memang telah ditentang, dengan alasan banyak perusahaan

sengaja membengkakkan (markup) biaya eksplorasi mereka untuk mendapatkan pendapatan lebih, namun pada saat yang sama KBH juga diakui merupakan salah satu insentif yang menarik investor asing sehingga membantu memaksimalkan keluaran dari aktivitas hulu Indonesia (Hoang, 2016). Saat ini masih berlangsung perdebatan apakah mengganti sistem KBH, adalah langkah tepat untuk mentransfer kendali dan pengawasan aktivitas hulu kepada PT Pertamina (atau BUMN lain yang dapat dibentuk khusus untuk tujuan tersebut), sementara perusahaan asing hanya diizinkan untuk mendukung dari sisi teknologi dan modal (ReedSmith, 2015).

Undang-Undang Migas yang baru kemungkinan juga akan merevisi penataan sistem regulasi industri minyak dan gas bumi Indonesia. Sejak dibubarkannya BPH Migas pada 2012, fungsi-fungsi regulasi dijalankan oleh SKK Migas, sebuah unit yang dibentuk di bawah Kementerian Energi sebagai respon langsung terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini pemerintah berencana membentuk dua badan publik baru sebagai bagian dari UU Migas untuk meregulasi aktivitas hulu maupun hilir.

Terakhir, harus dipahami pula bahwa salah satu bagian inti UU Migas yang baru adalah pembentukan suatu Dana Minyak. Dana Minyak ini akan digunakan

untuk mendukung PT Pertamina menjalankan aktivitas hilirnya untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas, mengurangi kerugian perusahaan, dan menjaga harga energi tetap stabil (Deal Street Asia, 2015). Pendanaan untuk Dana Minyak akan berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN dan pendapatan pajak. Hingga hari ini, masih belum jelas bagaimana Dana tersebut akan diselenggarakan (Rambu Energy, 2015).

References

- Antara. (2015, November 3). APBN 2016 miliki kemajuan dorong kesejahteraan. Retrieved from <http://www.antaranews.com/berita/527291/apbn-2016-miliki-kemajuan-dorong-kesejahteraan>
- Antara. (2015, October 8). Harga BBM turun, Menteri ESDM beberkan perhitungannya. Retrieved from <http://www.antaranews.com/berita/522435/harga-bbm-turun-menteri-esdm-beberkan-perhitungannya>
- Antara Aceh. (2015, February 14). Presiden: APBN-P Selesai Sekarang Waktunya Kerja. Retrieved from <http://www.antaraaceh.com/berita/23238/presiden-apbn-p-selesai-sekarang-waktunya-kerja>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013. Jakarta, Indonesia: BPK RI.
- Bah, A., Mardiananingsih, F. E., & Wijaya, L. (2014). An Evaluation of the Use of the Unified Database for Social Protection Programmes by Local Governments in Indonesia. Jakarta: TNP2K.
- Bisnis.com Jawa Barat. (2015, September 30). Tak Ada Kenaikan Harga BBM Sampai Desember 2015. Retrieved from <http://bandung.bisnis.com/m/read/20150930/34231/542623/tak-ada-kenaikan-harga-bbm-sampai-desember-2015>
- Cabinet Secretariat. (2015, November 9). APBN 2016. Retrieved from <http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/11/APBN-2016-7.pdf>
- Cabinet Secretariat. (2015, November 9). APBN 2016. Retrieved from <http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2015/11/APBN-2016-7.pdf>
- Cabinet Secretariat. (2015, May 20). Menteri ESDM Serahkan Proses Perizinan Migas Ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM. Retrieved from <http://setkab.go.id/menteri-esdm-serahkan-proses-perizinan-migas-ke-pelayanan-terpadu-satu-pintu-bkpm/>
- CNBC. (2015, November 9). UPDATE 1-Indonesia's audit of Petral trading unit reveals fraud -Pertamina CEO. Retrieved from <http://www.cnbc.com/2015/11/09/reuters-america-update-1-indonesias-audit-of-petral-trading-unit-reveals-fraud-pertamina-ceo.html>
- CNN Indonesia. (2015, October 27). 2016, PLN Cabut Subsidi dari 22 Juta Pelanggan Listrik 900 VA. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151027104220-85-87587/2016-pln-cabut-subsidi-dari-22-juta-pelanggan-listrik-900-va/>
- CNN Indonesia. (2015, February 9). Jika Tembus Rp 9.500, Pemerintah Siap Subsidi Premium Lagi. Retrieved February 27, 2015, from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150209183046-85-30792/jika-tembus-rp-9500-pemerintah-siap-subsidi-premium-lagi/>
- CNN Indonesia. (2015, November 8). Menteri ESDM Pertimbangkan Bawa Kasus Petral ke Meja Hijau. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151108192035-85-90260/menteri-esdm-pertimbangkan-bawa-kasus-petral-ke-meja-hijau/>
- CNN Indonesia. (2015, February 17). Prestasi APBN Jokowi, Subsidi Pangan Lebih Besar dari BBM. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150217161709-78-32829/prestasi-apbn-jokowi-subsidi-pangan-lebih-besar-dari-bbm/>
- Deal Street Asia. (2015, November). Retrieved from <http://www.dealstreetasia.com/stories/indonesia-to-create-petroleum-fund-for-financing-pertaminas-upstream-downstream-projects-9604/>
- Detik Finance. (2015, November 10). Retrieved from <http://finance.detik.com/read/2015/10/30/210030/3058396/4/sah-apbn-jokowi-2016-senilai-rp-2095-t-disetujui-dpr>
- Detik.com. (2015, October 30). Subsidi BBM dan Elpiji Tahun Depan Hanya Rp 63 Triliun. Retrieved from <http://finance.detik.com/read/2015/10/30/202904/3058382/1034/subsidi-bbm-dan-elpiji-tahun-depan-hanya-rp-63-triliun>

DPR RI. (2015). NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI . DEPUTI BIDANG PERUNDANG UNDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA .

DPR RI. (n.d). RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Retrieved from <http://www.dpr.go.id/prolegnas/rekam-jejak/id/24>

GSI. (2015, March). Indonesia Energy Subsidy Review: A biannual survey of energy subsidy policies. Issue 1. Volume 2. March 2015. Retrieved from https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_reviewi2v1_english.pdf

GSIa. (2015). Indonesia Energy Subsidy Briefing September. Retrieved from http://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/ffs_indonesia_newsbriefing_Sep2015_eng.pdf

Hoang, L. (2015, November). Natural Resource Governance Institute. Retrieved from <http://www.resourcegovernance.org/news/blog/regulatory-policy-indonesia-considers-legislation-boost-government-control-oil-gas-sectors>
Indonesia. (2006). Blueprint Pengelolaan Energy Nasional 2006 - 2025. Jakarta.

Kompas. (2015, October 25). Mulai 1 Januari 2016, Subsidi Listrik Hanya untuk Si Miskin. Retrieved from <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/25/171800726/Mulai.1.Januari.2016.Subsidi.Listrik.Hanya.untuk.Si.Miskin>

Ministry of Energy and Mineral Resources (2015), Presentasi, 31 Oktober, Jakarta

Ministry of Finance. (2015). Fiscal Note and State Budget 2015 Revision Proposal.

Rambu Energy. (2015, November). Retrieved from <http://www.rambuenenergy.com/2015/07/indonesia-govt-expects-petroleum-fund-to-be-operational-in-2016/>

ReedSmith. (2015). Retrieved from http://www.reedsmith.com/Indonesias-New-Draft-Oil-Gas-Law-04-21-2015/?utm_source=Mondaq&utm_medium=syndication&utm_campaign=View-Original

Riau Pos. (2015, November 5). Pencabutan Subsidi Listrik Ditunda Hingga 1 Juli 2016. Retrieved from <http://riaupos.co/91508-berita-pencabutan-subsidi-listrik-ditunda-hingga-1-juli-2016.html#.VkCtF8r4-xE>

SindoNews. (2015, February 14). Pemerintah Segera Alirkan PMN untuk 40 Perusahaan Negara. Retrieved from <http://ekbis.sindonews.com/read/964264/34/pemerintah-segera-alirkan-pmn-untuk-40-perusahaan-negara-1423871328>

SKK Migas. (2015, November). Retrieved from <http://www.skkmigas.go.id/en/mengenal-kontrak-hulu-migas-indonesia>

The Jakarta Post. (2015, November 9). Govt finishes investigation into Petral 'mafia' . Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/11/09/govt-finishes-investigation-petral-mafia.html>

The Jakarta Post. (2015, May 18). Reform team's suggestions cover age-old problems . Retrieved from <http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/18/reform-team-s-suggestions-cover-age-old-problems.html>

TNP2K. (n.d.). Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial. Retrieved from <http://bdt.tnp2k.go.id/>

TPID-DIY. (2014, September 18). Pertamina atasi migrasi elpiji 12 kilogram. Retrieved February 27, 2015, from <http://www.tp-id-diy.org/ruang-media/berita/300-pertamina-atasi-migrasi-elpiji-12-kilogram>

Published by the International Institute for Sustainable Development.

International Institute for Sustainable Development
Head Office

161 Portage Avenue East, 6th Floor, Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0Y4
Tel: +1 (204) 958-7700 | Fax: +1 (204) 958-7710 | Web site: www.iisd.org

About IISD

The International Institute for Sustainable Development (IISD) contributes to sustainable development by advancing policy recommendations on international trade and investment, economic policy, climate change and energy, and management of natural and social capital, as well as the enabling role of communication technologies in these areas. We report on international negotiations and disseminate knowledge gained through collaborative projects, resulting in more rigorous research, capacity building in developing countries, better networks spanning the North and the South, and better global connections among researchers, practitioners, citizens and policy-makers.

IISD's vision is better living for all—sustainably; its mission is to champion innovation, enabling societies to live sustainably. IISD is registered as a charitable organization in Canada and has 501(c)(3) status in the United States. IISD receives core operating support from the Government of Canada, provided through the Canadian International Development Agency (CIDA), the International Development Research Centre (IDRC), and from the Province of Manitoba. The Institute receives project funding from numerous governments inside and outside Canada, United Nations agencies, foundations and the private sector.

About GSI

GSI is an initiative of the International Institute for Sustainable Development (IISD). GSI puts a spotlight on subsidies—transfers of public money to private interests—and how they impact efforts to put the world economy on a path toward sustainable development. In cooperation with a growing international network of research and media partners, GSI seeks to lay bare just what good or harm public subsidies are doing; to encourage public debate and awareness of the options that are available for reform; and to provide policy-makers with the tools they need to secure sustainable outcomes for our societies and our planet.

International Institute for Sustainable Development
Global Subsidies Initiative
International Environment House 2
9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine,
Geneva, Switzerland

cbeaton@iisd.org
lucky.lontoh@iisd.org

Tel: +41 22 917-8373
Fax: +41 22 917-8054

<http://www.iisd.org/gsi/>